

# PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DENGAN KOMPONEN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota Jayapura)

Christi Novita Lorensa<sup>1</sup>

[remetwanovi@gmail.com](mailto:remetwanovi@gmail.com)

Dr. Syaikhul Fallah, SE., M. Si.<sup>2</sup>,

Mariolin A. Sanggenafa, SE., M.SA., Ak<sup>3</sup>

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

## ABSTRACT

*This study aims to look at factors that influence fraud prevention consisting of organizational culture, the role of internal audit, and internal control components. The controlling component here serves as an intervening variable. The population of this study are internal government auditors working in Inspectorate of Papua Province, Inspectorate of Jayapura City and Inspectorate of Jayapura Regency. The hypothesis in this study was tested using spss 16. The results showed that organizational culture, the role of Internal Auditor and internal control system have a significant positive effect on fraud prevention in Inspectorate of Papua Province, Jayapura City and Jayapura Regency. Organizational culture does not affect the prevention of fraud through the implementation of internal control components and the role of internal auditors does not affect the prevention of fraud through the implementation of internal control systems.*

**Keywords:** *Organizational Culture, Internal Audit, Components of Internal Control, Fraud Prevention*

## 1. PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini fenomena yang masih saja terjadi adalah masalah kecurangan atau *fraud*. Hal ini terjadi baik pada negara berkembang serta negara maju. Praktik *fraud* atau kecurangan dapat dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi dan juga dilakukan pihak dari luar organisasi baik secara kelompok maupun perorangan.

*Fraud* atau kecurangan telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, pemberian uang pelicin atau gratifikasi, penyuapan, pungutan liar, dan penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat di anggap sebagai tindakan korupsi dan sudah lazim terjadi di negara ini.

Tidak terkecuali pada Provinsi Papua pun telah ditemukan adanya tindakan kecurangan atau korupsi. Salah satu kasus kecurangan yang telah ditemukan adalah tindakan kecurangan atau korupsi proyek jalan depapre yang ditemukan oleh KPK dengan sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2015 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 42 miliar.

Tunggal dalam Yurmaini (2014) menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. *Fraud* atau kecurangan yang terjadi didalam suatu organisasi karena kurangnya pengawasan yang baik didalam organisasi tersebut. *Fraud* atau kecurangan yang terjadi didalam suatu pemerintahan di karenakan

<sup>1</sup> Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

oleh kegagalan pemerintah dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan, (Donald R. Cressey).

Tunggal dalam I Made Indra (2017) menyatakan bahwa kecurangan bisa dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yaitu dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Budaya organisasi adalah aturan-aturan, suatu kepercayaan, nilai-nilai, asumsi-asumsi, serta kebiasaan yang telah dibuat dan disetujui bersama oleh semua anggota organisasi sebagai pengarah atau pedoman dan acuan dalam aktivitas didalam organisasi. Budaya organisasi menggabungkan beberapa hal, antara lain :

- 1) Aturan tidak tertulis
- 2) Dasar tentang perilaku atau tindakan yang diharapkan
- 3) Sikap dan gaya yang terbentuk dari budaya secara nasional
- 4) Moral dalam masyarakat dan lingkungan yang ada disekitar organisasi

*Fraud* atau kecurangan juga dapat dicegah dengan dibentuknya satu unit kerja khusus yang bertugas mengawasi dan melakukan kontrol didalam organisasi yaitu audit internal. Audit internal terpisah dari sub-sub bidang suatu organisasi, ada batasan-batasan yang memisahkan fungsi audit internal dengan fungsi operasional perusahaan.

Di Indonesia pembentukan audit internal adalah hal wajib bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, dan Lembaga-lembaga pemerintahan pusat maupun daerah agar dapat menjalankan suatu organisasi secara efektif. Audit internal bertugas mendeteksi *fraud* yang tanpa disadari telah terjadi sebelum hal tersebut membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi.

Selain upaya pencegahan tindakan *fraud* dengan pengaruh budaya organisasi dan peran auditor internal, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan komponen struktur pengendalian internal. Untuk dapat mencegah permasalahan kecurangan perlu dibuat suatu sistem pengendalian internal yang efektif dan juga efisien.

Arens (2008:370) dalam Okky (2015) mengatakan bahwa pengendalian internal adalah satu proses yang dapat memberikan kepastian yang layak mengenai tercapainya tujuan manajemen dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi didalam suatu organisasi.

Didalam pemerintahan sendiri telah diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sistem pengendalian internal yang dibuat secara menyeluruh pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengendalian internal yang efektif dan efisiensi secara tidak langsung dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tindakan kecurangan, penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan akan semakin kecil.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 1 nomor 3 yang menyatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi bertugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap administrasi umum pemerintahan di daerah meliputi kebijakan, kelembagaan, pegawai, keuangan dan barang daerah. Inspektorat harus dapat memastikan tujuan dan sasaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam Pemerintahan Daerah Papua telah dibuat dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor swasta yaitu Bank Perkreditan rakyat, penelitian ini dilakukan pada sektor publik yaitu Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ?, 2). Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ?, 3). Apakah pelaksanaan komponen struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ?, 4). Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen struktur pengendalian internal ?, 5). Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen struktur pengendalian internal ?.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori *Fraud Diamond*

*Fraud Diamond* merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang alasan orang melakukan kecurangan atau *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Teori *fraud diamond* ini merupakan penyempurnaan teori sebelumnya yaitu teori *fraud triangle* yang dilakukan oleh Cressey pada tahun 1950.

*Fraud diamond* menambahkan satu elemen yang diyakini memiliki pengaruh terhadap *fraud* yaitu kemampuan (*capability*) sehingga *fraud diamond* memiliki 4 elemen. Keempat elemen *diamond* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan).

#### a. *Pressure* (Tekanan)

Yenny (2011) dalam Marliani (2015) mengatakan tekanan merujuk pada suatu hal yang terjadi pada kehidupan pribadi pelaku yang memaksanya untuk mencuri. Semakin tingginya *pressure* maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi. Menurut Yeni, tekanan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu *Financial pressure*, *Social pressure* dan *Other pressure*.

#### b. *Opportunity* (kesempatan)

Rachmania (2016) mengatakan adanya kesempatan atau peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, dan penyalahgunaan posisi atau otoritas. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas kecurangan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan.

#### c. *Rationalization* (rasionalisasi)

Albrecht (2012) dalam Marliani (2015) menjelaskan bahwa *rationalization* merupakan pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Rasionalisasi terjadi karena sebagian besar pelaku merasa dirinya tidak melakukan tindak kriminal, tetapi melakukan sesuatu yang sudah sewajarnya mereka lakukan. Rasionalisasi diperlukan oleh para pelaku *fraud* untuk menciptakan persepsi bahwa mereka adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya.

#### d. *Capability* (kemampuan)

Faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu individual *capability* yaitu sifat dan kemampuan seseorang atau individu yang menjadi peran besar yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan kecurangan.

### 2.2 *Budaya Organisasi*

Robbins dalam Suastawan (2017) mengatakan budaya organisasi sebagai satu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang dapat membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Schein (1985) dalam Suastawan (2017) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu pola asumsi dasar yang dikembangkan atau ditemukan oleh suatu kelompok orang sementara mereka belajar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berintegrasi dengan lingkungan internal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal.

Robbins (2006) dalam Noviriantini (2015) mengatakan ada beberapa fungsi budaya didalam organisasi yaitu :

1. Budaya mewakili peran untuk menyampaikan suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi.
2. Budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar dari pada kepentingan individu.
3. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial, karena budaya merupakan perekat sosial yang membantu memegang organisasi bersama-sama dengan menyediakan standar untuk apa yang harus karyawan katakan dan lakukan. Akhirnya itu adalah rasa keputusan dan mekanisme kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan.

4. Budaya memiliki peran yaitu menciptakan perbedaan antara satu organisasi dan organisasi lain.
5. Budaya mendefinisikan aturan permainan di dalam suatu organisasi. Tren saat ini menuju organisasi yang terdesentralisasi membuat budaya lebih penting daripada sebelumnya, namun ironisnya hal itu juga membuat membangun budaya yang kuat dan lebih sulit. Ketika otoritas dan kontrol sistem formal berkurang, berbagi makna budaya dapat menunjuk orang dalam arah yang sama.

### 2.3 Peran Auditor Internal

Dalam Standar Profesional Audit Internal (SPA) standar 120.2 tahun 2004 mengenai kecurangan menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, mengevaluasi serta menguji indikasi-indikasi kecurangan. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Peran auditor internal memiliki fungsi untuk membantu manajemen dalam mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi *fraud* yang terjadi di dalam suatu organisasi, badan atau perusahaan.

Auditor internal merupakan satu-satunya unit kerja yang paling tepat untuk memiliki peran sebagai pengawas terhadap tindakan kecurangan. BPKP (2008:43) peran yang sesuai untuk auditor internal adalah : 1). Peran dalam pencegahan *fraud*, 2). Peran dalam pendeteksian *fraud*.

Serta audit internal dituntut untuk lebih mewaspadai hal-hal yang menandakan adanya kemungkinan *fraud* yang meliputi : 1). Mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*. 2). Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada.

### 2.4 Komponen Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan ada beberapa komponen struktur pengendalian internal, antara lain :

a. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko seperti identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud adalah pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Identifikasi risiko dilakukan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dan pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

c. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud adalah memiliki karakteristik seperti kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis serta kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi adalah hal yang wajib diselenggarakan dengan efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. *Monitoring* (Pemantauan)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

## 2.5 Pencegahan Kecurangan

Jerry L. Turner, Theodore J. Mock, dan Rajendra P. Srivasta (2003:16) dalam Sukadwilinda (2013) tindakan kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya dapat disebabkan oleh tekanan pihak-pihak tertentu ataupun keinginan dari dalam diri individu itu sendiri yang ditunjang oleh peluang untuk melakukannya. Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain atau pihak lain (Arens et al 2008) dalam Wiliyanti.

BPKP (2008:37) mengatakan pencegahan *fraud* adalah upaya terintegrasi yang biasa menekan terjadinya faktor-faktor terjadinya *fraud* yaitu :

- 1). Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk melakukan terjadinya kecurangan
- 2). Menurunkan tekanan pada pegawai agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
- 3). Mengeliminasi alasan-alasan yang dapat menjadi pembenaran atas tindakan *fraud* yang dilakukan

Beberapa metode pencegahan yang biasa dilakukan oleh manajemen terdiri dari beberapa langkah yaitu :

- 1) Menetapkan kebijakan anti *fraud*
- 2) Prosedur pencegahan baku
- 3) Organisasi
- 4) Teknik pengendalian
- 5) Kepekaan terhadap *fraud*

### 3. METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil. Metode ini digunakan karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Papua, Inspektorat Kota Jayapura dan Inspektorat Kabupaten Jayapura dengan total sampel berjumlah 43 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yang berupa nilai atau skor dari jawaban yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dimana data yang didapatkan langsung dari sumber asli atau sumber pertama. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan didalamnya mencakup pernyataan – pernyataan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Metode *survey* merupakan metode pengumpulan data dengan membagikan kuesioner penelitian secara langsung kepada responden, untuk mendapatkan jawaban dari responden tersebut.

Variabel dependen di dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan. Variabel independen di dalam penelitian ini adalah budaya organisasi dan Auditor Internal. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah komponen struktur pengendalian internal. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software Smart PLS 3.0*.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.

Tunggal dalam Suastawan (2017) mengatakan bahwa kecurangan bisa dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi lewat pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Budaya organisasi merupakan sesuatu yang lebih dari perangkat aturan-aturan didalam suatu perusahaan, budaya organisasi adalah campuran yang lebih kompleks dari berbagai faktor yang bisa digabungkan untuk dibentuk menjadi budaya yang berlaku di dalam suatu organisasi.

Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik budaya organisasi yang diterapkan pada Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten Jayapura maka tindakan kecurangan bisa diminimalkan. Penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti dan Anita (2015) serta penelitian I Made Indra Dwi Putra Suastawan yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

#### 4.2. Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya peran auditor internal tidak menjamin dapat mencegah kecurangan. Jika dilihat dari hasil pengujiannya, indikator PA1 memiliki nilai terendah diantara enam indikator lainnya. Indikator PA1 berhubungan tentang mengevaluasi lingkungan pengendalian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa auditor internal belum dapat mengevaluasi lingkungan pengendalian secara tepat dan efektif sehingga belum dapat mencegah kecurangan terjadi. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hasil hipotesis ini antara lain bahwa auditor internal belum menjalankan perannya dengan baik, serta auditor internal belum maksimal menggunakan kemampuan profesional audit dalam segala bidang cakupan audit dalam proses pemeriksaan untuk dapat mencegah kecurangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti dan Anita (2015) yang menemukan bahwa peran auditor internal belum dapat mencegah kecurangan.

#### **4. 3. Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dikatakan bahwa komponen pengendalian internal berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Tuanakotta (2007:162) dalam Hermiyeti pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik dan aktif pengendalian internal yang diterapkan, maka dapat mencegah kecurangan terjadi.

Dari hasil penelitian, tampak bahwa komponen pengendalian internal memiliki dampak terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini mendukung penelitian Nisak Chairun dkk. (2013) dan penelitian Soleman (2013). Komponen pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Serta sejalan dengan hasil penelitian Zelmianti dan Anita (2015).

#### **4. 4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Melalui Komponen Pengendalian Internal**

Berdasarkan hasil pengujian *path coefficients* dapat diketahui bahwa komponen pengendalian internal merupakan variabel yang dapat menginterveningkan pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil uji *path coefficients* menunjukkan bahwa dengan adanya variabel komponen pengendalian internal yang menginterveningkan pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan memberikan nilai total efek yang lebih tinggi yaitu 0,760 jika dibandingkan dengan nilai pengujian antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,520. Budaya organisasi bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan perilaku serta sikap anggotanya. Hal ini menjelaskan penerapan budaya organisasi khususnya pada pengendalian internal bermanfaat untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi sehingga dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riba'ati (2003) yang menyatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi penerapan pengendalian internal. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Artini (2014) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Serta sejalan dengan penelitian Zelmiyenti (2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen pengendalian internal.

#### **4. 5. Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Melalui Komponen Pengendalian Internal**

Berdasarkan hasil pengujian *path coefficients* dapat diketahui bahwa komponen pengendalian internal merupakan variabel yang dapat menginterveningkan pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Hasil uji *path coefficients* menunjukkan bahwa dengan adanya variabel komponen pengendalian internal yang menginterveningkan pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan memberikan nilai total efek yang lebih tinggi yaitu 0,180 jika dibandingkan dengan nilai pengujian antara peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,007. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Pencegahan kecurangan akan lebih mudah dilakukan dari pada mendeteksi kecurangan itu terjadi. Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu mencegah kecurangan melalui pemeriksaan dan pengevaluasian kecukupan efektivitas pengendalian internal. Jika pengendalian internal sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan akan banyak berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karo Karo (2015) dan Penelitian Simbolan (2009) yang menyatakan bahwa audit internal dan pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Serta sejalan dengan penelitian Zelmiyenti (2015) yang menyatakan bahwa peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen pengendalian internal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Komponen Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening” :

- a. Terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan sehingga hipotesis ini diterima.
- b. Tidak terdapat pengaruh antara peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan sehingga hipotesis ini ditolak.
- c. Terdapat pengaruh antara komponen pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan sehingga hipotesis ini diterima.
- d. Terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen pengendalian internal sehingga hipotesis ini diterima.
- e. Terdapat pengaruh antara peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen pengendalian internal sehingga hipotesis ini diterima.

### 5.2. Saran

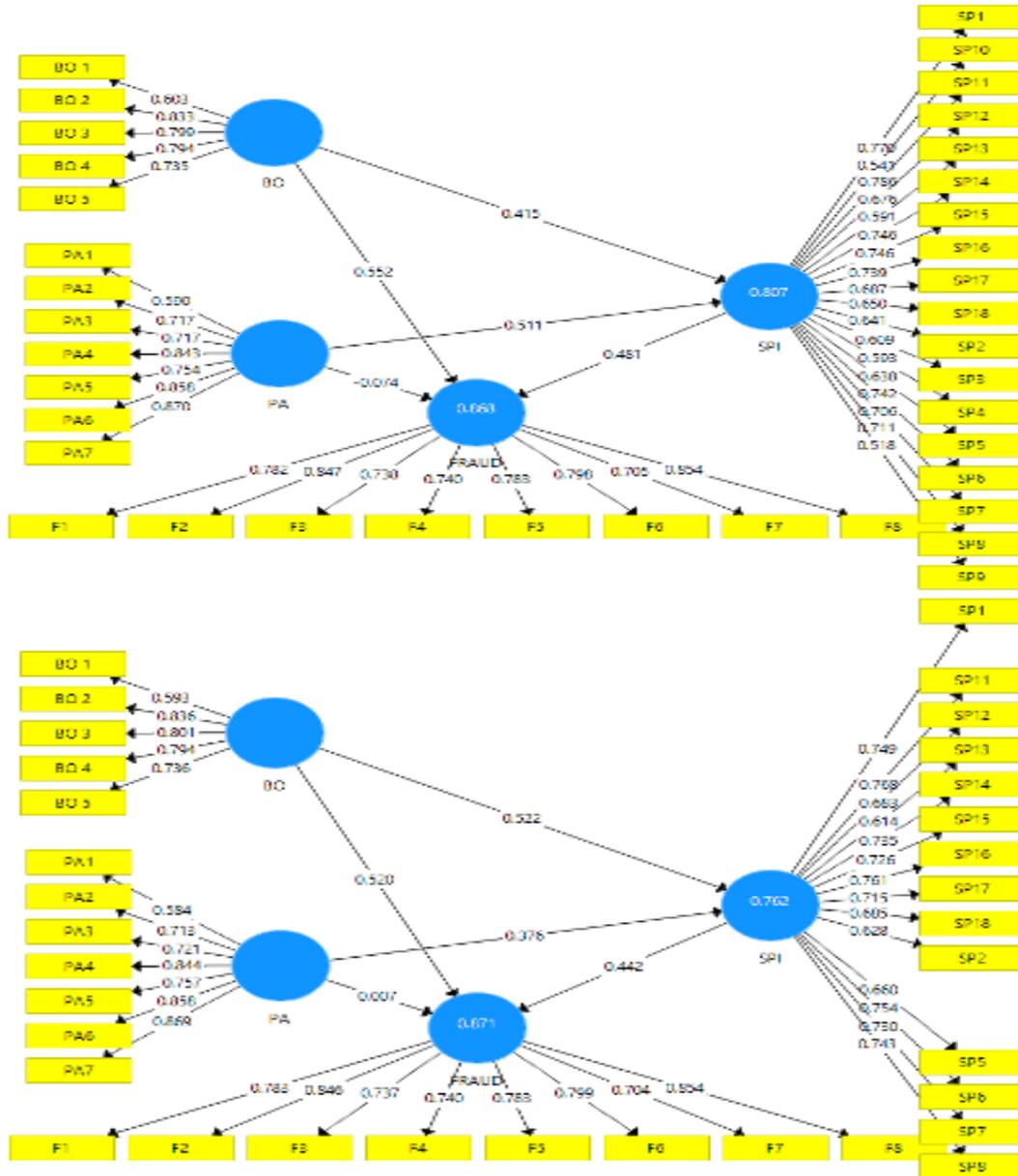
- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian seperti: pemberian kompensasi, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, *whistle blowing system*, resiko *fraud*, moralitas, kesesuaian kompensasi dan variabel lain yang dapat mencegah kecurangan. Atau dapat menggunakan teori yang berbeda dari penelitian ini, jika penelitian ini menggunakan teori *fraud diamond* penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori *fraud triangle* atau *fraud scale*.
- b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggali lebih banyak informasi terkait dengan perusahaan/instansi yang diteliti. Dan untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan sampel auditor yang lebih banyak sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat..

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Okky Faisal, & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, 2(3), 3295–3302.
- Ananggadipa, S. (2012). *Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi Theory of Planned Behavior Dan Teknologi Acceptance Model*.
- Artini, Ni Luh Eka Ari, Adiputra, I Made Pradana, & Herawati, Nyoman Trisna. (2014). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (skpd) Kabupaten Jembrana. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 12.
- Dhany, Umi Rahma, Priantono, S., & Budianto, M. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Peminimalisir Fraud (Kecurangan) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, 4, 46–60.
- Festi, T., Andreas, & Natariasari, R. (2014). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Perbankan Di Pekanbaru). *Jom Fekon*, 1(2), 1–16.
- Halimatusaidah, E., & Gunwan, B. (2014). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (studi pada pt. pos indonesia persero), 2(1), 300–313.
- Hermiyetti. (2009). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. *Stekpi Jakarta*, 13(4), 29–39.
- Kadir, H. (1995). Pengaruh Pegendalian Internal Dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pencegahan Fraud (Studi Pada Auditor Inspektorat Kota Kendari), 39–54.
- Karo, Rio Sempana Karo. (2015). Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Lestari, Morita Indah. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum Di Kota Padang), (September).
- Marliani, M., & Jogi, Y. (2015). Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas.
- Norsain. (2014). Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Fraud (Studi Kasus Pada pnpm Mandiri Perkotaan Kecamatan Kalianget). *Jurnal Performance Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 50–66.
- Noviriantini, K., Darmawan, Nyoman Ari Surya, & Werastuti, Desak Nyoman Sri. (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana), 3(1).
- Rachmania, A. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015.
- Ratnawati, A., & Sukadwilinda. (2013). Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan, 6(1), 11–21.
- Section, A. U. (2002). Consideration Of Fraud In a Financial Statement Audit, 1719–1770.
- Setiyanti, Sri Wiranti. (2013). Budaya Organisasi, 5(3), 112–122.
- Soleman, R. (2002). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Gonernance Terhadap Pencegahan Fraud, 57–74.
- Suastawan, I Made Indra Dwi Putra, Sujana, E., & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Buleleng). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 7(1).
- Sutaryo. (2018). Determinan Efektivitas Audit Internal di Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 1–10.
- Urbah, Dede Nadia. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Kompensasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan akuntansi (Studi di bprs Bangun Drajat Warga Yogyakarta).

- Wahyuni, S. (2013). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Pada UD.Dwi Jaya Sentosa Surabaya, 2(3), 1–23.
- Widaningsih, M., & Hakim, Desy Nur. (2015). Pengaruh Profesional Auditor Internal Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud), 3(1), 586–602.
- Widarti. (2009). Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (bei), (99).
- Widiyastuti, M., & Pamudji, S. (2009). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (fraud). *Value Added*, 5(2), 52–73. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wiliyanti, R., Sari, Ria Nelly, & Darlis, E. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi), 1–15.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia). *Jurnal Riset Dan Akuntansi Indonesia*, 9(3), 346–366.
- Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam, 3(1), 93–104.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 8(10), 67–76.

**HASIL UJI PLS**



	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
<b>BO</b>	<b>0,573</b>
<b>FRAUD</b>	<b>0,612</b>
<b>PA</b>	<b>0,592</b>
<b>SPI</b>	<b>0,508</b>

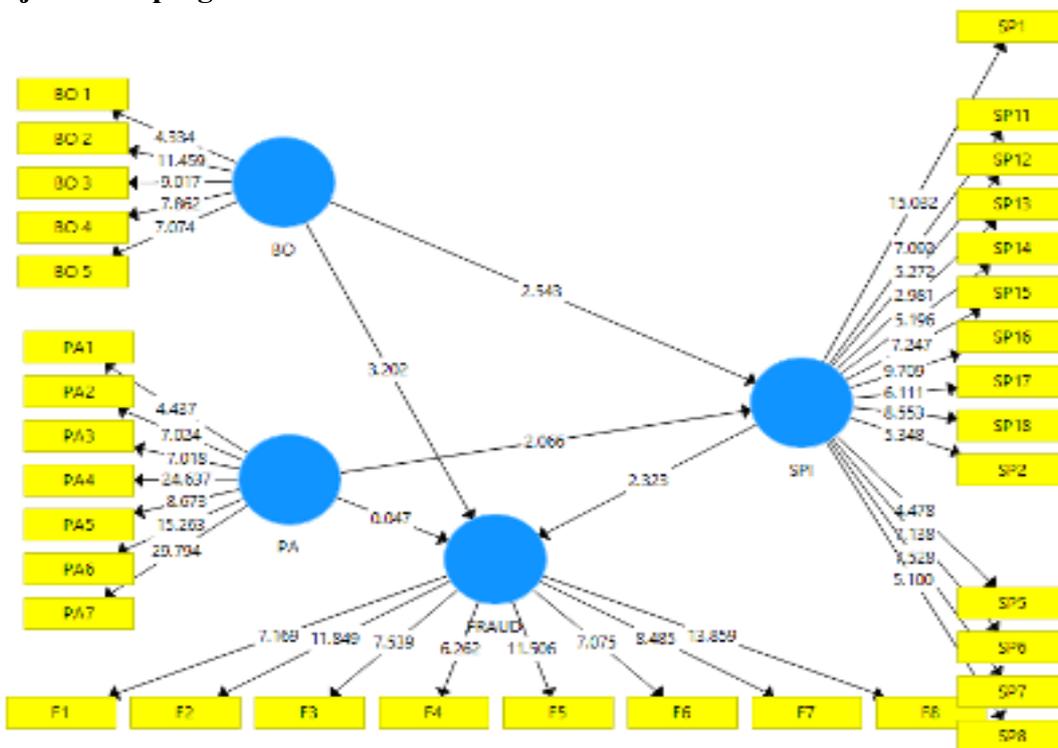
	<b>Composite Reliability</b>
<b>BO</b>	<b>0,869</b>

<b>FRAUD</b>	<b>0,926</b>
<b>PA</b>	<b>0,909</b>
<b>SPI</b>	<b>0,935</b>

	<b>Cronbach's Alpha</b>
<b>BO</b>	<b>0,811</b>
<b>FRAUD</b>	<b>0,909</b>
<b>PA</b>	<b>0,882</b>
<b>SPI</b>	<b>0,925</b>

	<b>R Square</b>
<b>FRAUD</b>	<b>0,871</b>
<b>SPI</b>	<b>0,762</b>

**Uji Bootstaping**



**T-Statistic**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
<b>BO -&gt; FRAUD</b>	<b>0,751</b>	<b>0,719</b>	<b>0,150</b>	<b>5,014</b>	<b>0,000</b>
<b>BO -&gt; SPI</b>	<b>0,522</b>	<b>0,465</b>	<b>0,205</b>	<b>2,543</b>	<b>0,011</b>
<b>PA -&gt; FRAUD</b>	<b>0,174</b>	<b>0,206</b>	<b>0,153</b>	<b>1,134</b>	<b>0,257</b>
<b>PA -&gt; SPI</b>	<b>0,376</b>	<b>0,435</b>	<b>0,182</b>	<b>2,066</b>	<b>0,039</b>
<b>SPI -&gt; FRAUD</b>	<b>0,442</b>	<b>0,440</b>	<b>0,190</b>	<b>2,323</b>	<b>0,021</b>

**Path Coefficient**

	<b>SPI</b>	<b>F</b>	<b>TE</b>
<b>SPI</b>		0,442	0,750724

---

<b>BO</b>	0,522	0,520	
	SPI	F	TE
<b>SPI</b>		0,442	0,750724
<b>BO</b>	0,522	0,520	